

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta
- Chantieka, A. A. S. W., Kekhususan, P., & Udayana, U. 2018. *Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit*. Kertha Wicara, 7(3), 1-17. (n.d.). *Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit*.
- Deswita Maharani Putri, 2022 *Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dnegan Alasan TIdak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata yang Lain*, Makassar.
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, 2020 *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Fred BG Tumbuan, 2004, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, Dalam: Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Dalam: Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN., *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 91
- Jerry Hoff, 2009., *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta.
- Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadadnea Group, Depok.
- M. Hadi Shubhan, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhamadiyah Malang Press, Malang.
- Rudhy A. Lontoh, S.H, Denny Kailimang, S.H., Benny Ponto, S.H., 2021, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung.

- Setiawan, 2004, *Pengertian Jatuh Tempo, Dalam: Emmy Yuhassarie*, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Vide: Peter J.M Declercq, 2002, Netherlands Insolvency Law, the Netherlands Bankruptcy Act and the Most Important Legal Concept, T.M.C Asser Press, The Hague, p.63, Dalam: Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., CN., Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, Hukum Kepailitan Di Indonesia: *Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Syamsudin Manan Sianaga, 2000, *Analisi dan Evaluasi Hukum tentang restrukturisasi utang pada PKPU*, Republik Indonesia, Jakarta.
- Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Adam Barnini, Nyulistiowati Suryanti dan Artaji, 2021, Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit, *Media Iuris* Vol. 4
- Andani, 2021, D. Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 3.
- Andani, D., & Pratiwi, W. B. 2021. Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 742–751.
- Devi Indiani, Wiwin Budi Pertiwi, 2021 “Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan PKPU”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Volume 28.
- Muhammad Redha Anshari 2016, Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit, *Lex Renaissance*, Volume 1 Nomor 1
- Siti Anisah, 1999 Alternatif Penyelesaian Utang Piutang dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Magister Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1. No. 1.
- Theresia Endang Ratnawati, 2020 Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9, No. 2.

### C. Skripsi

Afifah Ilma Hamzani, “Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan dan PKPU Pasca SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Pengembang Apartemen atau Rumah Susun Studi Putusan No. 71/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst)” Universitas Andalas, 2025

### D. Undang-Undang

Pedoman Mahkamah Agung yang tertuang dalam KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

### E. Internet

Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, “Jenis-Jenis Kreditor dalam Kepailitan dan PKPU”, 2023 <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-kreditor-dalam-kepailitan-dan-pkpu/>, Diakses Pada tanggal 10 Juni 2025 jam 11.00

Putu Bravo Timothy, S.H., M.H, Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan-lt57cac8511d5b4/>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2025, jam 15.30

Tim Hukum Online,”6 Prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata” [HukumOnline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-pembuktian-hukum-acara-perdata-lt6433b5e539383/),2023,<https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-pembuktian-hukum-acara-perdata-lt6433b5e539383/> . Diakses pada tanggal 15 Mei 2025 jam 14.23

Tim HukumOnline, Sebut Pengembang Tak Bisa Dipailit/PKPU, SEMA 3/2023 Dinilai Tak Sejalan UU Kepailitan, 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/sebut-pengembang-tak-bisa-dipailit-pkpu--sema-3-2023-dinilai-tak-sejalan-uu-kepailitan-lt65eee651b9ad2/> . Diakses Pada 23 Mei 2025 Pukul 16.17

Tim HukumOnline,Memahami Konsep Pembuktian Sederhana Pada Sengketa Pailit-PKPU, 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-konsep-pembuktian-sederhana-dalam-sengketa-pailit-pkpu-lt65f1653d00575/> Diakses Pada 23 Mei 2025 Pukul 18.00